

Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Periode Tahun 2014 – 2018)

M. Yoga Susilo Widyanto¹, Sjamsul Arief²
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya²
myogasusilo20@gmail.com¹, syamsul@untag.ac.id²

Abstract

The purpose of this study was to assess the financial performance of the Sidoarjo Regency Government using the Financial Ratio, the data used was the Sidoarjo Regency APBD in 2014 - 2018. This research method used 5 aspects of the Regional Financial Ratio, namely: 1) PAD Effectiveness Ratio, 2) Ratio Efficiency, 3) Regional Financial Independence Ratio, 4) Growth Ratio, 5) Harmony Ratio. The results of data analysis obtained an average of each regional financial ratio along with the criteria, namely; Effectiveness ratio of average PAD of 118.75%, Average Efficiency Ratio of 102.15%, Ratio of Regional Financial Independence on average of 59.67%, Growth Ratio there are 4 ratings namely: 1) average PAD growth of 7.20%, 2) Average income growth of 7.87%, 3) Operational Expenditures average growth of -8.21%, 4) Capital Expenditures average growth of 26.67%, Ratio There are 2 points in harmony, namely Capital Expenditures and Operational Expenditures, Capital Expenditures averaged 44.27% while Operational Expenditures amounted to 55.73%. The conclusion was obtained that the Regional Financial Performance of Sidoarjo Regency viewed from 5 aspects of ratio calculation. The PAD0 Effectiveness Ratio is said to be Effective, then the Efficiency Ratio which is said to be 2014-2015 is inefficient and 2016 to 2018 efficient, the Regional Financial Independence Ratio is said to be Participatory, the Growth Ratio which records a plus only for minus Operational Expenditures, and the Correlation Ratio that is said to be harmonious.

Keywords: PAD Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Growth Ratio, Efficiency Ratio

PENDAHULUAN

Terbentuknya otonomi daerah dimulai semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri dari mulai menggerakkan roda Pemerintahan Daerah Sendiri dan mengelola kekayaan daerah, dan juga mengelola mengenai keuangan daerah secara mandiri. Keberhasilan otonomi daerah juga tidak terlepas dari proses pengelolaan

keuangan daerah yang baik juga serta pengalokasian dana guna menjalankan roda pemerintahan dan juga pembangunan daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa dapat dikategorikan Pemerintah daerah tersebut telah berhasil membangun dan mengelola daerah tersebut, dalam penelitian ini tujuannya untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam periode tahun anggaran 2014 – 2018, dari mulai perhitungan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Belanja Daerah dari mulai Belanja Operasional dan Belanja Modal serta menganalisa kenaikan maupun penurunan pendapatan daerah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari Rasio Keserasian?

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995). Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Darise, 2009). Menurut pasal 1 UU no.32 tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Adapun beberapa bagian dari APBD yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah uang yang masuk kedalam kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun tersebut. Dalam standar akuntansi pemerintah (Mahmudi, 2016). Jadi pendapatan adalah seluruh penerimaan daerah yang didapatkan dari berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan membangun daerah dan menjalankan roda pemerintahan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pembinaan masyarakat daerah. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

(Mahmudi, 2016). Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Rasio Keuangan Daerah

Rasio Keuangan merupakan suatu perhitungan rasio yang menggunakan laporan keuangan sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja dalam sebuah perusahaan maupun instansi. Menurut Faud (2016:137), Rasio Keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, maksudnya yaitu penelitian yang melakukan perhitungan-perhitungan dan kajian-kajian terhadap data keuangan daerah yang diperoleh untuk memecahkan suatu masalah yang ada yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari rasio keuangan yang terdiri dari beberapa indikator seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah berupa data kuantitatif, dimana data tersebut berupa data yang dihitung dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan

adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan dokumentasi mengambil dari website DJPK Kementerian Keuangan yaitu data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014-2018.

Metode Analisa Data

Metode penganalisa data dalam penelitian ini menggunakan 5 Rasio Keuangan yaitu Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian:

Rasio Efektifitas PAD

Rasio yang menunjukkan tingkat efektifitas dari penerimaan PAD Daerah. Indikator dari rasio ini ada realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD. Rumus/perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times$$

100%

Kriteria Penilaian Pengukuran Efektifitas PAD

Presentase	Kriteria
(x>100%)	Efektif
(x=100%)	Efektif Berimbang
(x<100%)	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Anggaran Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian Rasio Efisiensi

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan

ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah begitupun sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Dana Bantuan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Rasio Pertumbuhan

Rasio dimana untuk mengetahui apakah daerah tersebut dalam anggaran periode tertentu kinerja keuangan mengalami pertumbuhan yang positif atau sebaliknya mengalami pertumbuhan yang negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{Pn - P0}{P0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah yang dihitung pada tahun ke-n

P0 = Total Pendapatan Daerah yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Kecerasan

Rasio Kecerasan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Kecerasan ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio

Belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

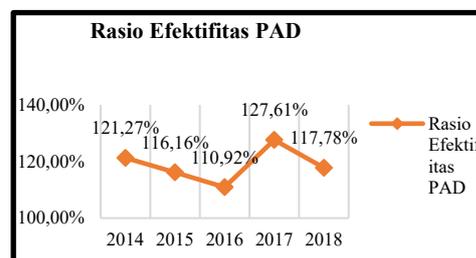
2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio Belanja Modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektifitas PAD

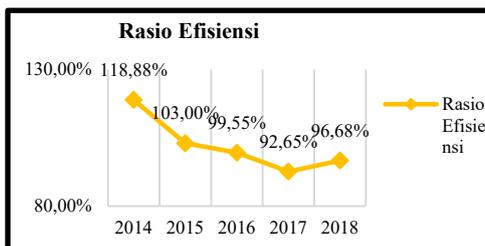
Rasio Efektifitas PAD yaitu perhitungan untuk menilai target realisasi PAD yang didapat dengan target anggaran PAD yang sudah dirancang sebelumnya dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp.1.115.332.938.501,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.266.786.727.409,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.335.284.797.901,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.671.806.819.697,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.685.558.666.147,01. Untuk Anggaran PAD tahun 2014 sebesar Rp.919.705.959.365,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.090.575.879.460,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.203.782.695.817,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.310.069.237.292,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.431.052.747.437,00. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

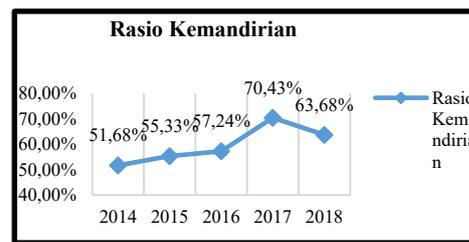
Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi bahwa realisasi belanja tiap tahun naik namun juga diimbangi dengan realisasi pendapatan yang juga mengalami kenaikan. Realisasi belanja pada tahun 2014 sebesar Rp.3.891.267.451.395,00, tahun 2015 sebesar Rp.3.662.799.265.943,00, tahun 2016 sebesar

Rp.3.651.617.165.087,00, tahun 2017 sebesar Rp.3.748.313.122.059,00, tahun 2018 sebesar Rp.4.188.537.810.911,10. Untuk Realisasi Pendapatan tahun 2014 sebesar Rp.3.273.379.955.996,00, tahun 2015 sebesar Rp.3.556.219.138.762,00, tahun 2016 sebesar Rp.3.668.041.524.401,00, tahun 2017 sebesar Rp.4.045.685.362.113,00, dan tahun 2018 sebesar Rp.4.332.577.984.768,01. Hasil Presentase perhitungan Rasio Efisiensi pada tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:



Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

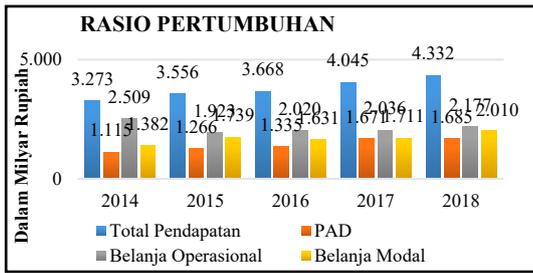
Pada perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sampai 2018 ada 3 point yang mempengaruhi perhitungan yaitu Realisasi PAD, Dana Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah, untuk Realisasi PAD tahun 2014 sebesar Rp.1.115.332.938.501,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.266.786.727.409,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.335.284.797.901,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.671.806.819.697,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.685.558.666.147,00. Untuk Dana Transfer tahun 2014 sebesar Rp.1.402.935.437.170,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.388.639.002.033,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.690.087.000.000,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.708.887.132.594,00, tahun 2018 sebesar Rp.1.793.474.341.790,00. Sementara untuk Lain – lain Pendapatan Yang Sah tahun 2014 sebesar Rp.755.111.580.325,00, tahun 2015 sebesar Rp.900.793.409.320,00, tahun 2016 sebesar Rp.642.669.726.500,00, tahun 2017 sebesar Rp.664.991.409.822,00, tahun 2018 sebesar Rp.853.544.976.831,00. Berikut dibawah ini hasil presentase perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam bentuk gambar grafik dibawah ini.



Rasio Pertumbuhan

Berikut Grafik Pertumbuhan Pendapatan, PAD, Belanja Operasional dan Modal dibawah ini.

Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan kenaikannya mengarah ke arah positif, tahun 2014 pendapatannya sebesar Rp.3.273.379.955.996,00 naik menjadi Rp.3.556.219.138.762,00 pada tahun 2015, di tahun 2016 naik menjadi Rp.3.668.041.524.401,00, tahun 2017 kembali naik menjadi Rp.4.045.685.362.113,00, tahun 2018 kembali naik menjadi Rp.4.332.577.984.768,01. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Sidoarjo tiap tahunnya mengalami kenaikan, tahun 2014 sebesar Rp.1.115.332.938.501,00, tahun 2015 naik menjadi Rp.1.266.786.727.409,00, sementara tahun 2016 menjadi Rp.1.335.284.797.901,00, tahun 2017 naik menjadi Rp.1.671.806.819.697,00, sementara tahun 2018 naik menjadi Rp.1.685.558.666.147,01. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sempat turun dratis pada tahun 2015, tahun 2016,2017,2018 kembali naik, Belanja Operasional tahun 2014 sebesar Rp.2.509.235.777.530,00, tahun 2015 turun menjadi Rp.1.923.283.189.247,00, sementara tahun 2016 naik kembali menjadi Rp.2.020.298.165.087,00, tahun 2017 kembali naik menjadi Rp.2.036.794.548.539,00, tahun 2018 sebesar Rp.2.177.927.459.154,16. Sementara Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 total Belanja Modal Rp.1.382.031.673.865,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.739.516.076.696,00, tahun 2016 sebesar Rp.1.631.319.000.000,00, tahun 2017 sebesar Rp.1.711.518.573.520,00, tahun 2018 sebesar Rp.2.010.610.351.756,94.



Rasio Keceriasan

Dari perhitungan Rasio Keceriasan dapat dilihat bahwa realisasi total belanja operasional daerah Kabupaten Sidoarjo total tertinggi pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 turun dan 2016,2017,2018 angka nya naik namun tidak begitu tinggi, tahun 2014 totalnya sebesar Rp.2.509.235.777.530,00, tahun 2015 turun menjadi Rp.1.923.283.189.247,00, kemudian tahun 2016 naik menjadi Rp.2.020.298.165.087,00, tahun 2017 naik lagi menjadi Rp.2.036.794.548.539,00, tahun 2018 naik menjadi Rp.2.177.927.459.154,16. Untuk realisasi total belanja modal daerah Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2018, tahun 2014 total sebesar Rp.1.382.031.673.865,00, tahun 2015 naik menjadi Rp.1.739.516.076.696,00, kemudian tahun 2016 naik lagi menjadi Rp.1.631.319.000.000,00, tahun 2017 naik menjadi Rp.1.711.518.573.520,00, Tahun 2018 naik menjadi Rp.2.010.610.351.756,94. Sementara Total Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 sebesar Rp.3.891.267.451.395,00, tahun 2015 turun menjadi Rp3.662.799.265.943,00, tahun 2016 kembali turun menjadi Rp.3.651.617.165.087,00, tahun 2017 naik menjadi Rp.3.748.313.122.059,00, tahun 2018 naik menjadi Rp.4.188.537.810.911,10. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.



KESIMPULAN

Selama 5 tahun Rasio Efektifitas PAD tahun 2014: (121,27%), 2015: (116,16%), 2016: (110,92%), 2017: (127,61%), 2018: (117,78%), dan rata – rata Rasio nya sebesar 118,75% itu artinya kriteria yang didapat efektif karena diatas 100% namun begitu angka presentasinya cenderung fluktuatif, namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik kinerjanya dalam menyerap semua pendapatan asli daerah sehingga target anggaran selama 5 tahun tersebut dapat dilampaui.

Untuk Rasio Efisiensi pada tahun 2014 dan 2015 dikatak tidak efisien karena total belanja daerah lebih besar daripada pendapatan yang diterima, namun pada tahun 2016, 2017, 2018 sudah dikatakan efisien karena bisa menekan belanja dan menyerap pendapatan lebih sehingga tidak terjadi defisit anggaran.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo rata – rata yang didapat nilainya sebesar 59,67% dan dari tahun 2014 sampai 2018 rasio yang didapat diatas 50% itu artinya kriteria yang di dapat yaitu partisipatif yang artinya bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat sudah semakin berkurang, itu artinya juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mulai mampu untuk tergantung bergantung pada dana bantuan dan dapat memanfaatkan sumber – sumber pedapatan di daerah sendiri untuk dimanfaatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga membangun daerahnya.

Untuk Rasio Pertumbuhan keuangan Kabupaten Sidoarjo, untuk pendapatan total rata – rata pertumbuhan dari tahun 2014 sampai 2018 sebesar 11,25% untuk pertumbuhan PAD Kabupaten Sidoarjo sebesar 7,29%%, Untuk Belanja Operasional rata – rata sebesar -2,64%, untuk Belanja Modal rata – rata sebesar 10,51%. Ini artinya bahwa untuk Total Pendapatan Daerah dan PAD Kabupaten Sidoarjo pertumbuhannya kearah yang positif setiap tahunnya, dan untuk Belanja Operasional pertumbuhannya minus dikarenakan pengalokasian dana belanja lebih diarahkab ke Belanja Modal

yang pertumbuhannya positif, itu artinya fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekarang adalah memabngun Kabupaten Sidoarjo.

Rasio Keserasian keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dihitung dengan melihat Rasio Belanja Operasional dan Rasio Belanja Modal, jika dilihat pada tahun 2014 sampai 2018 pengalokasian Belanja Daerah lebih mengarah ke Belanja Modal karena setiap tahunnya Rasio Belanja Modal presentase naik sementara Rasio Belanja Operasional nya turun, ini berarti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyerasikan antara pengeluaran Operasional Daerah dengan pengeluaran guna membangun Kabupaten Sidoarjo dan hasil yang didapat presentasinya sudah bisa dikatakan Hampir serasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Akram Arif Nugroho. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 – 2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Cherrya Dhia Wenny. (2012). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan STIE MDP Palembang.
- Dedi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2014 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Jakarta. 2019. *Data Anggaran Dan Realisasi APBD Tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada bulan Mei 2020)
- Juddy Julian. (2012). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Juliani Dora. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mohammad Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nurhidayat. (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.